

## **ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK TRANSPORTASI ANGKUTAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Fajar Alan Syahrier**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

[fajarsyahrier@unja.ac.id](mailto:fajarsyahrier@unja.ac.id)

\*Corresponding author

**Galank Pratama**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi

[galangkpratama@unja.ac.id](mailto:galangkpratama@unja.ac.id)

**Jefri Al Kausar**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

[jefri.alkausar@unja.ac.id](mailto:jefri.alkausar@unja.ac.id)

**Mirza Sazeta**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

[mirza.sazeta@unja.ac.id](mailto:mirza.sazeta@unja.ac.id)

### **Abstrak**

Keberadaan tambang batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sektor yang berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila di kelola dengan baik, tetapi dengan adanya aktifitas angkutan tambang batu bara yang menggunakan jalan umum memicu konflik antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat setempat. Hubungan yang bersifat konflik tersebut tidak terlepas dari adanya dampak ekologis yang diakibatkan oleh aktifitas tambang batu bara, yang mana pemerintah daerah tidak memiliki komitmen dalam menjaga kualitas lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait aktifitas pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah terkait kebijakan yang mengatur tentang transportasi hasil tambang yang cenderung menguntungkan perusahaan tambang, pada aspek negosiasi prinsip adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait aktifitas pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan umum, dan adanya kebutuhan warga yang terhalangi akibat dampak transportasi tambang batu bara.

**Kata Kunci :** Penyebab Konflik, Pertambangan batu bara, Dampak lingkungan

### **Abstract**

*The existence of coal mines in Indragiri Hulu Regency is a sector that functions to increase Regional Original Income (PAD) if managed well, but the existence of coal mine transportation activities using public roads has triggered conflict between the Indragiri Hulu Regency Government and the local community. This conflictual relationship cannot be separated from the ecological impact caused by coal mining activities, where the local government has no commitment to maintaining the quality of the community's environment. In this research, the author wants to analyze the dynamics of conflict between civil society and the Indragiri Hulu Regency Government regarding coal mining activities in Indragiri Hulu Regency. This research uses qualitative methods. The results of the research are that there is public distrust in the Regional Government regarding policies governing the transportation*

*of mining products which tend to benefit mining companies, in the principle negotiation aspect there are differences in views between the Regional Government and the community regarding coal transportation activities using public roads, and the needs of residents which is hampered by the impact of coal mining transportation.*

**Keywords:** *Causes of Conflict, Coal Mining, Environmental Impact*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang mineral dan batu bara, yang merupakan salah satu pilar utama dalam kontribusi terhadap perekonomian negara ini. Pertambangan telah lama menjadi sektor yang vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) serta pendapatan devisa negara melalui ekspor mineral dan komoditas tambang lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi dan modernisasi industri tambang telah memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor industri dan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Namun, di sisi lain, aktivitas industri pertambangan juga menghadirkan tantangan signifikan. Misalnya, dampak lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air merupakan isu yang sering kali menimbulkan konflik dan menjadi fokus perdebatan dikalangan masyarakat (Syamsuadi et al. 2023). Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina, dan mengembangkan hubungan antara manusia (Hartati, Syamsuadi, and Arisandi 2021). Dalam rangka usaha tersebut, manusia bertempat tinggal bersama-sama di suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur keadaan dan lingkungan mempengaruhi di mana tempat tinggal bersama diadakan (Syamsuadi et al. 2020).

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok (Mustanir, Hamid, and Syarifuddin 2019). Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya. (Irwandi and Chotim 2017). Konflik dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi,

unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan masyarakat lain (Arisandi et al. 2020). Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan seseorang atau kelompok yang berkonflik dalam situasi yang sama namun dengan pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung sejak lama. Masalah konflik merupakan suatu gejala sosial yang akan muncul pada setiap waktu tertentu di dalam suatu masyarakat (Zainuddin, Syamsuadi, and Yahya 2017). Masalah konflik muncul dikarenakan adanya pihak-pihak yang ingin memiliki atau menguasai sumber dan posisi yang langka (*position scarcity dan resource*) (Zainuddin, Syamsuadi, and Yahya 2018). Masalah konflik merupakan pendorong dalam terjadinya dinamika perubahan baik itu ekonomi, politik, dan sosial. Pihak pihak yang berkepentingan berusaha merebutkan apapun yang menjadi kepentingan dari pihak itu sendiri. Dalam menghadapi suatu konflik yang memungkinkan dapat memunculkan suatu kekerasan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu merancang pengelolaan masalah konflik (Fauzi and Nulhaqim Soni A. 2024).

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu adanya konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan batu bara terkait dampak transportasi pertambangan batu bara. Konflik pemerintah dengan masyarakat berawal ketika masyarakat resah terhadap kondisi lingkungan yang kronis akibat dampak dari transportasi pertambangan batubara yang menimbulkan kerusakan dan kemacetan di jalan umum. Pada tahun 2022, masyarakat melakukan protes dan keberatan terhadap dampak tambang yang disuarakan masyarakat mulai dari memblokir jalan, melakukan beragam aksi demonstrasi di jalan, di perkantoran, hingga ke kantor Bupati Indragiri Hulu. Namun, protes dan keberatan terhadap dampak tambang yang disuarakan oleh berbagai pihak tidak cukup mendapat respon yang memuaskan dari pemerintah daerah. Dinamika konflik tersebut terjadi karena dampak dari aktivitas transportasi pertambangan batu bara yang memiliki resiko terhadap rusaknya lingkungan yang berdampak kepada rusaknya ekosistem dan lingkungan di sekitar area pertambangan. Aktivitas pertambangan juga beresiko terhadap lingkungan sosial, karena konflik yang sering terjadi akibat dari dampak aktivitas pertambangan ini .

Tambang batu bara sering kali melibatkan struktur kekuasaan kompleks antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal (Halundaka 2021).

Pemerintah sering berperan sebagai regulator dan pemberi izin, sedangkan perusahaan tambang memiliki kepentingan ekonomi besar dalam eksploitasi sumber daya. Konflik muncul ketika kekuasaan ini tidak seimbang atau ketika masyarakat lokal merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan atau tidak diwakili secara adil. Tambang batu bara bukan hanya sebagai proyek ekonomi atau teknis, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan dampak multidimensi terhadap masyarakat lokal (Endah 2020). Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menguraikan faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penyebab konflik dapat dilihat dari lima teori utama yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, dan teori transformasi konflik. Teori hubungan masyarakat teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia akan digunakan untuk menganalisis penyebab konflik sosial dampak transportasi angkutan pertambangan batu bara Di Kabupaten Indragiri Hulu. Teori hubungan Masyarakat menyebutkan bahwa suatu konflik di masyarakat terjadi akibat adanya perbedaan yang dalam sehingga menyebabkan polarisasi, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan kepentingan atau nilai yang dipegang oleh masing-masing pihak. Teori negosiasi prinsip. Dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sementara teori hubungan Masyarakat mengemukakan bahwa konflik disebabkan kebutuhan dasar manusia meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu terutama terkait dengan keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi (Fisher et al. 2001).

## **STUDI LITERATUR**

Penelitian terkait konflik pertambangan batu bara yang pertama oleh (Citra, Hapsa, and Baidawi 2021) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara”. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengeluarkan kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batu bara. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah provinsi jambi bersama beberapa pihak yang memiliki perusahaan batu bara di daerah Wilayah Provinsi Jambi berdiskusi dan bersepakat untuk merencanakan pembangunan jalur khusus bagi

transportasi batu bara seperti membangun jalan khusus bagi transportasi batu bara serta memanfaatkan jalur transportasi sungai, yaitu Sungai Batanghari. Pada tingkat implementasinya kebijakan ini belum berjalan efektif hal itu didasarkan beberapa hal seperti minimnya anggaran, pengawasan serta kurangnya dorongan dari pihak perusahaan batu bara. Selanjutnya penelitian terdahulu yang kedua terkait konflik pertambangan oleh (Fauzi and Nulhaqim Soni A. 2024) dengan judul “Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian (Darmalaksana 2020).

Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik.

Penelitian terkait yang ketiga mengenai konflik pertambangan oleh (Irwandi and Chotim 2017)] dengan judul “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)” Tulisan ini memaparkan kronologi konflik, faktor-faktor penyebab konflik, serta bentuk konflik dan penyelesaian konflik antara masyarakat, pemerintah dan penambangan pasir perusahaan di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Konflik yang terjadi di Dusun Sungai Samak dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi pemerintahan desa yang

terbuka terhadap masyarakat, perbedaan pentingnya dampak yang ditimbulkan kegiatan penambangan. Bentuk konflik sosial yang terjadi di Dusun Sungai Samak adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antar komunitas, pemerintah desa dan perusahaan pertambangan.

Sedangkan konflik horizontal terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri antara kelompok yang pro dan yang menentang karena adanya perbedaan kepentingan. Langkah-langkah penyelesaian konflik dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan pertambangan termasuk negosiasi; Konsiliasi; Mediasi; dan Arbitrase. Persamaan penelitian ini dengan tiga penelitian diatas adalah sama sama meneliti tentang pertambangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan lokus yang mana penelitan ini mengkaji tentang dinamika konflik masyarakat dan pemerintah terhadap dampak transportasi angkutan pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif (Abdussamad 2022). Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumen. Analisa data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2020) .

## **PEMBAHASAN**

Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang berdekatan dengan Pantai Timur Pulau Sumatera dan berada di bagian hilir dari alur Sungai Indragiri, dengan sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah. Kabupaten ini mempunyai potensi kekayaan alam berupa minyak bumi, emas dan batubara. Berikut merupakan daftar perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu:

**Tabel 1.**  
**Nama Perusahaan Pertambangan Batu Bara**  
**Di Kabupaten Indragiri Hulu**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Komoditas</b>	<b>Kecamatan</b>
1	PT Anugerah Riau Coal	Batu Bara	Batang Peranap
2	PT Era Perkasa Mining	Batu Bara	Rakit Kulim
3	PT Bukit Asam Tbk.	Batu Bara	Peranap
4	PT Samantaka Batubara	Batu Bara	Batang Peranap, Peranap
5	PT Nusantara Indah Lestari	Batu Bara	Rakit Kulim
6	PT Pengembangan Investasi Riau	Batu Bara	Peranap
7	PT Riau Bumi Mineral	Batu Bara	Rakit Kulim
8	PT Ausindo Andalas Mandiri	Batu Bara	Batang Cenaku, Peranap Rakit Kulim, Seberida, Batang
9	PT Ausindo Prima Andalas	Batu Bara	Cenaku

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2016*

Keberadaan tambang batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu di satu sisi merupakan sektor yang berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila di kelola dengan baik. Otonomi Daerah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengolah sendiri potensi daerahnya yang lebih luas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Namun di lain sisi aktivitas tambang batu bara sejak tahun 2014 hingga 2024 menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu aktivitas transportasi angkutan batu bara dengan menggunakan mobil truk tronton yang melebihi dimensi dan muatan mengakibatkan rusaknya jalan umum dan menimbulkan kemacetan.

Puluhan hingga ratusan kendaraan pengangkut batubara, yang masing-masing mengangkut batu bara seberat 30 ton lebih yang setiap harinya lalu lalang mengangkut hasil tambang batu bara telah merusak jalan lintas tengah (jalan provinsi) di Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari Kecamatan Peranap, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Sei Lala, Kecamatan Pasir Penyau hingga ke Kecamatan Kuala Cenaku.

Tidak hanya jalan rusak yang mengganggu aktivitas Masyarakat, aktivitas transportasi Batubara juga menyebabkan banyak kecelakaan, debu jalanan serta debu batu bara telah menyebabkan polusi udara. Dikhawatirkan mengganggu kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Debu jalanan dan debu batubara yang dihirup oleh masyarakat, berpotensi menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lainnya. Hal ini tentu saja berbahaya bagi tumbuh kembang anak dan mengancam kelangsungan hidup generasi masa depan yang akan memajukan Kecamatan Peranap. Kondisi – kondisi demikian, pada dasarnya telah mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, yaitu jalan umum. Aktivitas pertambangan batubara dengan kendaraan pengangkutnya, jika terus dilanjutkan akan semakin memperparah kondisi hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Aktivitas perkebunan, rumah makan, serta usaha lain milik masyarakat, dipastikan akan terganggu dan mempengaruhi kesejahteraan dasar masyarakat.

### **Penyebab Konflik**

Teori hubungan masyarakat menyebutkan bahwa konflik terjadi karena adanya polarisasi yang tinggi di masyarakat polarisasi di masyarakat tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan maupun nilai dari tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan konflik antara masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Daerah hal ini terjadi karena kepentingan masyarakat yang berbeda dengan kepentingan pemerintah sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan polarisasi yang dalam antara masyarakat dengan pemerintah.

Adanya penerapan otonomi daerah pasca reformasi pemerintah di level lokal baik itu provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayahnya tersebut untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Maka secara rasional yang dilakukan oleh pemerintah ialah membuka keran investasi kepada pihak swasta untuk melakukan eksploitasi alam terutama di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang banyak terdapat kandungan batu bara nya menjadi komoditas yang dapat mendatangkan laba bagi perusahaan swasta. Terkait pemasukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan membuka ruang bagi para perusahaan swasta untuk melakukan aktifitas

pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu, tidak terlepas dari peran negara untuk menstabilkan struktur sistem kapitalisme agar dapat berproses mengumpulkan laba secara lancar, hal ini seperti yang dikemukakan oleh (Block 1977) yang mengatakan bahwa negara atau lebih spesifik nya pemerintah berusaha untuk menciptakan suasana agar sistem kapitalisme dapat berjalan dengan baik, yang apabila dimungkinkannya pengembangan modal oleh pihak swasta dan adanya reproduksi dari sistem kapitalisme itu sendiri, pemerintah melakukan hal tersebut dikarenakan negara dalam suatu sistem yang kapitalistik dapat hidup jika adanya pemasukan yang berasal dari pajak yang dihasilkan dari adanya akumulasi laba dari para perusahaan swasta.

Analisa berdasarkan teori diatas maka dapat dipahami pemberian izin tambang oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlepas dari adanya kondisi struktural demikian bahwa pemberian izin tambang merupakan pemasukan pemerintah karena dalam sistem yang kapitalistik lah pemerintah agar tetap survive dalam hal ini mendapatkan pemasukan dengan cara menciptakan suasana bisnis yang baik (*business confidence*), tetapi yang menjadi permasalahan bahwa dengan mengutamakan kepentingan bisnis berpotensi untuk menegasikan kepentingan lingkungan sekitar karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa logika kapitalisme lebih mengarah kepada bagaimana cara memanfaatkan alam secara efektif dan efisien dalam mendapatkan laba, setiap objek merupakan sesuatu yang dapat dimodifikasi, dan pemerintah perlu untuk memungkinkan hal itu terjadi, tetapi ini tidak dibarengi dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Ketiadaan kesadaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pro akan pembangunan berkelanjutan merupakan kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan hijau (*green goverment*) yang tentunya banyak dibuktikan dengan besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah dari mulai aktivitas pertambangan, industri bila dibandingkan melindungi dan melestarikan lingkungan hidup . Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pemerintah daerah memberikan izin pertambangan dengan mengharapkan keuntungan yang didapat sebagai wujud manfaat yang didapat dari penerapan otonomi daerah. Namun dalam pemberian izin tersebut masyarakat menilai pemerintah kurang tegas dan cenderung berpihak

pada perusahaan terutama terkait kebijakan transportasi angkutan batu bara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang, Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 91 ayat 1 yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan. Berdasarkan UU tersebut Tentunya bertentangan dengan nilai dan kepentingan masyarakat sipil di Kabupaten Indragiri Hulu karena selama ini praktiknya perusahaan melakukan aktivitas transportasi tambang batu bara menggunakan jalan umum.

### Gambar 1.

Spanduk Aksi Unjuk Rasa di Kecamatan Peranap  
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Sebagaimana yang disampaikan salah satu Masyarakat “semua aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu yang melewati jalan umum tidak dapat di benarkan, dan harus memiliki jalan khusus untuk melakukan pengangkutan hasil tambang, patut diduga perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Inhu telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan kami

menduga ada yang melakukan penambangan ilegal (*Illegal Mining*) di luar ijin yang mereka miliki”.

Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya konflik adalah dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, dalam teori tersebut dikatakan bahwa terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan, hal ini berarti bahwa konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Terkait hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator dan pemberi izin, sedangkan perusahaan tambang memiliki kepentingan ekonomi besar dalam eksploitasi sumber daya. Konflik muncul ketika kekuasaan ini tidak seimbang atau ketika masyarakat lokal merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan atau tidak diwakili secara adil. Terkait hal ini Masyarakat menginginkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, supaya mengambil keputusan yang menguntungkan untuk masyarakat dengan tidak memihak kepada kepentingan pengusaha.

Upaya pemerintah selama ini hanya memperbaiki jalan umum, tapi perbaikan tersebut dinilai tidak maksimal karena sifatnya hanya sementara, dan jalan yang dilalui truck pengangkut batu bara tersebut kembali mengalami kerusakan. Perusahaan terkesan tidak ingin mengeluarkan modal yang besar dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Kekecewaan masyarakat dengan pemerintah terkait maraknya Truck angkutan Batubara Overload dan Over Dimension (ODOL) yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu sudah tidak bisa di tolerir lagi aktivitasnya. Menyikapi persoalan ini, Masyarakat membentuk koalisi Forum Masyarakat Indragiri Menuntut (F-MIM), Kabupaten Indragiri Hulu yang tergabung dari berbagai kecamatan, mulai dari masyarakat yang berada di areal lokasi dampak tambang batu bara di Kecamatan Peranap, sampai Kecamatan Kuala Cenaku. Melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Indragiri Hulu. Adapun kepentingan masyarakat sipil di Kabupaten Indragiri Hulu yang menginginkan adanya jalan khusus terkait transportasi angkutan batu bara agar terjaganya kelestarian lingkungan yang mana mereka tidak menginginkan perusahaan tambang batu bara menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil tambang mereka yang mengakibatkan kerusakan jalan umum dan dampak lingkungan lainnya.

**Gambar 2.**  
Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu  
Tahun 2024



Sumber: <https://detaksatu.com>

Teori kebutuhan manusia mengatakan bahwa sumber dari adanya konflik ialah keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu perbedaan tentang sejauh mana kebutuhan dasar kelompok, dan orang-orang di dalamnya, terhalangi atau terpenuhi lebih lanjut kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang dipenuhi untuk menunjang perkembangan manusia. Dengan adanya dampak aktifitas transportasi pertambangan batubara yang telah diberikan izinnya oleh Pemda mengakibatkan beberapa kebutuhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu terhalangi atau tidak terpenuhi. Pelanggaran hak – hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik, yaitu jalan umum juga diperparah dengan sikap pemerintah

Pemerintah, melalui perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta aparat penegak hukum, disinyalir mengabaikan rule of law. Kebutuhan yang diperlukan oleh warga masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunjang perkembangan individu nya yaitu ketersediaan lingkungan yang berkualitas, yang mana dengan kualitas ekologis yang baik dapat menunjang kehidupan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang dipengaruhi oleh ekosistemnya, sebaliknya jika ekosistem dimana manusia hidup itu terganggu misalkan dengan adanya kerusakan lingkungan maka dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri sebagai penghuni ekosistem karena dari sanalah kehidupan manusia ditunjang, kasus yang

terjadi akibat aktifitas transportasi pertambangan batu bara ialah kerusakan jalan umum sekitar wilayah pertambangan yang mana jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam menunjang kehidupan masyarakat, selain itu debu jalan menyebabkan kualitas udara memburuk sehingga menimbulkan gangguan pernapasan (ISPA) bagi masyarakat sekitar. semakin jelas bahwa adanya perbedaan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah yaitu kualitas lingkungan berhadapan dengan kepentingan ekonomi (peningkatan pendapatan daerah) menyebabkan konflik berkepanjangan dan sesuai dengan pendekatan konflik perlu dilakukan kompromi diantara dua pihak.

### **Gambar 3.**

Aksi Blokade Truk Pengangkut Batu Bara  
di Kecamatan Peranap Kabupaten  
Indragiri Hulu Tahun 2023



Sumber: Dokumentasi Lapangan

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konflik antara pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat terkait dampak transportasi pertambangan batu bara disebabkan oleh :

1. Hubungan masyarakat. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola izin transportasi pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi Pemda di nilai kurang tegas menjalankan aturannya, dalam hal ini perusahaan tambang batu bara tidak menjalankan Peraturan Tentang pengelolaan tambang batubara sebagai mana mestinya, Dimana Perusahaan Batubara selama ini menggunakan jalan umum sebagai transportasi angkutan batubara hal ini diperparah dengan kendaraan yang digunakan oleh Perusahaan tersebut melebihi dimensi dan muatan yang mengakibatkan kerusakan jalan dan dampak lingkungan lainnya.
2. Negosiasi prinsip Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan tambang batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini ditandai dengan Masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu berkoalisi membentuk gerakan sosial dan melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah segera merealisasikan jalan alternatif sesuai dengan UU No 03 Tahun 2020 terkait pembangunan jalan khusus untuk aktifitas transportasi batu bara agar tidak mengganggu jalan utama yang mereka lalui di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Kebutuhan manusia. Adanya aktivitas pertambangan batubara tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya beberapa kebutuhan masyarakat sekitar. yaitu kebutuhan akan lingkungan berkualitas. kerusakan infrastruktur publik seperti rusak nya jalan, dampak dari rusaknya jalan mengganggu aktifitas Masyarakat, jalan menjadi berlobang dan rawan terjadi kecelakaan, serta debu dari jalan yang rusak menyebabkan penyakit ISPA.

## **REFERENSI**

- Abdussamad, Zuchri. 2022. "Buku Metode Penelitian Kualitatif."
- Arisandi, Diki, Amir Syamsuadi, Tengku Fahrul Gafar, Seri Hartati, and Muhammad Fajar Anugerah. 2020. "Pembinaan Masyarakat Peduli Api Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Desa Dayun Dalam Menangani Bencana Kebakaran Lahan." *IKRA-ITH ABDIMAS* 3(3): 34–37.
- Block, Fred L. 1977. *The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States International Monetary Policy from World War II to the Present*. Univ of California Press.
- Citra, Darminto, Hapsa Hapsa, and Ahmad Baidawi. 2021. "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 6(2): 1–13.

- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1): 135–43.
- Fauzi, Rizki Muhammad, and Nulhaqim Soni A. 2024. "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues in Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6: 34–41.
- Fisher, Simon, I D Abdi, R Smith, J Ludin, S Williams, and S Williams. 2001. "Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak, Terj." *SN. Karikasari dkk, Jakarta: Gramedia*.
- Halundaka, I G. 2021. *Peran ASEAN Social Cultural Community Melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Dalam Mengatasi Permasalahan Polusi Kabut Asap ....* repository.uksw.edu. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22299>.
- Hartati, Seri, Amir Syamsuadi, and Diki Arisandi. 2021. "University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 Using COBIT 5 Framework." *Journal of Physics: Conference Series* 1783(1): 12021. doi:10.1088/1742-6596/1783/1/012021.
- Irwandi, and Endah R. Chotim. 2017. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, Dan Swasta." *Jispo* 7(2): 24–42.
- Mustanir, Ahmad, Hariyanti Hamid, and Rifni Nikmat Syarifuddin. 2019. "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(3): 227–39.
- Sugiyono, P D. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif." *Edited By Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA*.
- Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Luluk Elvitaria, and Spto Setyo Nugroho. 2023. "Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6): 8436–50.
- Syamsuadi, Amir, S Hartati, L Trisnawati, L Elvitaria, D Arisandi, and A F Syahrier. 2020. "Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Pekanbaru: Taman Karya*.
- Zainuddin, M, Amir Syamsuadi, and Mhd Rafi Yahya. 2017. "PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QURAN ANAK JALANAN DI SIMPANG PASAR PAGI PEKANBARU." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1): 7–14.
- Zainuddin, M, Amir Syamsuadi, and Mhd Rafi Yahya. 2018. "Peningkatan Eksistensi Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Se Kota Pekanbaru Melalui Konsep Manajemen Dan Kepemimpinan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 2(1): 9–18.